

BAB III

EKOWISATA BAGI PEMBANGUNAN DI INDONESIA

Meningkatnya isu lingkungan di lingkungan global telah membawa warna baru dalam perpolitikan dunia. Kebijakan-kebijakan yang dibuat kemudian banyak yang disesuaikan dengan konsep keberlanjutan hidup lingkungan. Kepentingan manusia, baik dalam lingkup individu, kelompok, bangsa, negara bahkan universal terhadap keberlanjutan hidup lingkungan menjadikan isu ini semakin besar peranannya.

Lingkungan kemudian meluas dan bukan hanya menjadi pembahasan terpisah tetapi telah mulai diadaptasi dalam aspek-aspek kehidupan. Dilingkup negara, kebutuhan pelestarian lingkungan ini kemudian disesuaikan dengan upaya pencapaian kepentingan nasional masing-masing.

Dalam pelaksanaannya, meskipun upaya pencapaian kepentingan nasional beragam cara dan alatnya, namun begitu isu lingkungan pun mampu mempengaruhi dan diselaraskan dengan aspek-aspek pemenuh-kebutuhan tersebut. Salah satu aspek yang sangat terpengaruh oleh perkembangan isu lingkungan ini adalah ekowisata.

A. Isu Lingkungan dan Perkembangan Ekowisata

1. Sejarah Perkembangan Ekowisata

Masa ditandainya perkembangan isu lingkungan adalah ketika pada tahun 1972 diadakan Konferensi Stockholm tentang Lingkungan

Hidup Manusia. Era dua dekade setelahnya isu lingkungan kemudian

berkembang sangat pesat. Banyak dibahas masalah-masalah terkait lingkungan yang semakin mengukuhkan peran lingkungan dalam agenda politik global. Dalam perkembangannya isu lingkungan yang berpengaruh multisektoral juga telah mempengaruhi cara-cara negara dalam memenuhi kepentingannya.

Perkembangan isu lingkungan ternyata sangat berpengaruh bagi perkembangan ekowisata di suatu negara. Keduanya berada dalam jalur yang sama dan ekowisata berkembang mengikuti perkembangan isu lingkungan. Kerusakan alam, menurunnya kesejahteraan penduduk lokal pada satu sisi, dan kemajuan pembangunan yang bertumpu pada aspek ekonomi semata, melahirkan paradigma pembangunan yang secara komprehensif memahami prinsip-prinsip ekowisata.

Rumusan ekowisata ini sebenarnya telah ada sejak 1987 dikemukakan oleh Hector Ceballos-Lascurain yaitu sbb³⁹:

"Nature or ecotourism can be defined as tourism that consist in travelling to relatively undisturbed or uncontaminated natural areas with the specific objectives of studying, admiring, and enjoying the scenery and its wild plantas and animals, as well as any existing cultural manifestations (both past and present) found in the areas."

Yang kemudian pada awal tahun 1990 disempurnakan oleh The International Ecotourism Society (TIES) yaitu sebagai berikut:

³⁹ EKOWISTA INDONESIA, *Definisi Ekowisata* (diakses 5 Desember 2009); diunduh dari

"Ecotourism is responsible travel to natural areas which conserved the environment and improves the welfare of local people."

Definisi yang dikemukakan TIES sebenarnya hampir sama dengan yang diberikan oleh Hector Ceballos-Lascurain yaitu sama-sama menggambarkan kegiatan wisata di alam terbuka, hanya saja menurut TIES dalam kegiatan ekowisata terkandung unsur-unsur kepedulian, tanggung jawab dan komitmen terhadap kelestarian lingkungan dan kesejahteraan penduduk setempat.

Ekowisata menuntut persyaratan tambahan bagi pelestarian alam. Definisi lain menyebutkan bahwa ekowisata adalah wisata alam berdampak ringan yang menyebabkan terpeliharanya spesies dan habitatnya secara langsung dengan peranannya dalam pelestarian dan atau secara tidak langsung dengan memberikan pandangan kepada masyarakat setempat, untuk membuat masyarakat setempat dapat menaruh nilai dan melindungi wisata alam dan kehidupan lainnya sebagai sumber pendapatan (Goodwin, 1997:124).⁴⁰ Oleh sebab itu dengan kata lain ekowisata merupakan upaya untuk memaksimalkan dan sekaligus melestarikan potensi sumber-sumber alam dan budaya untuk dijadikan sebagai sumber pendapatan yang berkesinambungan.

⁴⁰ Gumelar S. Sastrayuda, Hand Out Mata Kuliah Concept Resort and Leisure, *Strategi Pengembangan dan Pengelolaan Resort and Leisure*, 2010, (Diakses pada: 21 Juli 2010), diunduh dari <http://file.upi.edu/Direktori/B-FPIPS/LAINNYA/GUMELAR/HAND-OUT-MATKUL-KONSEP-RESORT-AND-LEISURE/DEVELOPMENT-AND-MANAGEMENT-OF-ECOTOURISM>

Masuknya isu lingkungan kedalam politik global dan berbagai segi kehidupan kemudian meningkatkan dan menumbuhkan kegiatan ekowisata. Perkembangan isu lingkungan dalam politik global telah menyadarkan masyarakat akan bahaya kehilangan besar terhadap spesies-spesies flora dan fauna yang ada serta kerusakan ekosistem yang terus berlanjut yang kemudian menjadi bahan pertimbangan bagi lahirnya kerjasama-kerjasama internasional dibidang terkait seperti CITES. Kekhawatiran akan lingkungan kemudian bukan lagi menjadi tanggung jawab negara atau pemerintah tertentu semata namun telah menjadi kepentingan bersama global dan periode-periode perkembangan ekowisata beriringan dengan meningkatnya peranan isu lingkungan tersebut.

Sejarah ekowisata sendiri sebenarnya dapat ditelusuri dari sejarah perjalanan eksplorasi yang telah dilakukan oleh Marcopollo, Washington, Wallacea, Weber, Junghuhn dan Van Steines dan masih banyak yang lain merupakan awal perjalanan antar pulau dan antar benua. Para penjelajah tersebut melakukan perjalanan ke alam yang merupakan awal dari perjalanan ekowisata meskipun sebagian perjalanan ini tidak memberikan keuntungan konservasi daerah alami, kebudayaan asli dan atau spesies langka (Lascurain, 1993)⁴¹.

⁴¹ EKOWISTA INDONESIA. *Konsep Ekowisata*. (diakses pada 5 Desember 2009); diunduh dari

Lebih spesifik lagi, Kegiatan ekowisata moderen pertama barangkali dimulai pada kegiatan *safari* (berburu hewan di alam bebas) yang dilakukan oleh para petualang dan pemburu di benua hitam Afrika. Kegiatan ini berkembang pada awal 1900, khususnya di Kenya yang kemudian kegiatan safari tersebut oleh Pemerintahan Kenya digunakan sebagai kesempatan dan peluang bisnis. Ketika akhirnya disadari bahwa perburuan yang tidak terkendali dapat mengakibatkan kepunahan spesies flora atau fauna dan mengganggu keseimbangan ekosistem yang ada, kegiatan tersebut dihentikan. Belajar dari pengalaman ini, pemerintah Kenya akhirnya melakukan banyak perubahan didalam pelaksanaan kegiatan safari dan mulai menerapkan konsep-konsep ekowisata modern didalam industri pariwisatanya.

Pada akhir dekade 1970-an gagasan ekowisata mulai diperbincangkan dan dianggap sebagai suatu alternative kegiatan wisata tradisional yang selama ini kita kenal. Selama masa 1980-an beberapa badan dunia, peneliti, pencinta lingkungan, ahli-ahli dibidang pariwisata dan beberapa negara mulai mencoba merumuskan dan mulai menjalankan kegiatan ini dengan caranya masing-masing⁴².

Pasca Konferensi Stockholm, kegiatan ekowisata mulai dikembangkan secara lebih moderen dan mendapat perbaikan kualitas pelaksanaannya oleh banyak pemerintah negara. Kemudian dilanjutkan dengan CITES, Konferensi Nairobi dan beberapa lainnya yang

⁴² Andy Drumm and Alan Moore, *An Introduction to Ecotourism Planning, The Nature Conservancy, Arlington, Virginia, USA, 2007*

diadaptasi dalam undang-undang pelestarian lingkungan membantu dalam peningkatan peran ekowisata bagi sebuah negara seperti misalnya costarica.

Pada awal 1980-an, Costarica dipilih oleh badan dunia PBB sebagai proyek percontohan kegiatan ekowisata. Belajar dari pengalaman di Kenya, di Costarica pelaksanaan kegiatan ini melibatkan berbagai pihak, yaitu: pemerintah, swasta, masyarakat dan badan lingkungan hidup international. Proyek ini kemudian dinilai berhasil dan menjadi contoh bagi pelaksanaan kegiatan ekowisata diseluruh dunia.⁴³

Perkembangan ekowisata didunia secara umum terasa cukup cepat dan mendapat prioritas dan perhatian dari pemerintahan masing-masing negara yang melaksanakannya. Meskipun dimulai dari benua Afrika, ekowisata berkembang pesat justru di Amerika Latin. Di beberapa negara Amerika Latin (terutama yang dialiri oleh sungai Amazon), kegiatan mengunjungi objek wisata alam berkembang menjadi kegiatan penyelamatan lingkungan hidup (konservasi). Seiring dengan berjalannya waktu, ternyata banyak peserta ekowisata yang tertarik dan ingin berkontribusi didalam penyelamatan alam (flora dan fauna) dari kerusakan yang semakin parah. Beberapa lembaga atau organisasi yang bergerak dibidang lingkungan hidup menangkap

⁴³ Putra Alam, *Sahabat Alam: Ekowisata, peluang yang dibuang?*, (diakses 22 April 2010); diunduh dari <http://www.sahabat.com>

peluang ini dan mulai mengadakan kegiatan reboisasi beserta dengan masyarakat luas termasuk peserta ekowisata, hingga kepada penggalangan dana dan penanaman pohon yang dapat diikuti melalui media internet. Ekowisata terus berkembang dari yang hanya merupakan pariwisata alam biasa menjadi kegiatan konservasi lingkungan yang memasukkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaannya.

Kegiatan ekowisata yang melibatkan banyak entitas dan berkembang mengikuti perkembangan isu lingkungan kemudian melahirkan kerjasama-kerjasama internasional seperti pada tahun 1995 diadakan World Conference on Sustainable Tourism di Lanzarote yang kemudian menghasilkan kesepakatan bidang terkait.⁴⁴

Perkembangan pariwisata bahkan mendapat perhatian khusus dari masyarakat dunia sehingga kemudian pada tahun 1989 didirikan *The International Ecotourism Society* (TIES) yang bermarkas di Washington. TIES merupakan lembaga non-profit internasional pertama yang didedikasikan untuk ekowisata sebagai sebuah alat untuk konservasi dan pembangunan berkelanjutan⁴⁵.

Adapun prinsip-prinsip ekowisata menurut TIES adalah sebagai berikut:

1. Minimalkan dampak.

⁴⁴ *Adventure Ecotourism in Ecuador, Ecotourism Definition*, (diakses 22 April 2010); diunduh dari <http://www.piedrablanca.org/ecotourism-definition.htm>

⁴⁵ *The International Ecotourism Society, Our Story*, (diakses 22 April 2010); diunduh dari http://www.ecotourism.org/site/c_10KYBCL-EB_49252554/E012/Our_Story_The_International

2. Membangun kesadaran rasa hormat terhadap lingkungan dan budaya.
3. Memberikan pengalaman yang positif bagi pengunjung dan masyarakat setempat.
4. Memberikan manfaat keuangan langsung untuk konservasi.
5. Memberikan manfaat finansial dan pemberdayaan bagi masyarakat setempat.
6. Meningkatkan sensitivitas politik, lingkungan, dan iklim sosial di negara tuan rumah.

Secara garis besar, perkembangan ekowisata tidak dapat dipisahkan dari perkembangan isu lingkungan yang ada. Sejarah Ekowisata mengikuti perkembangan isu lingkungan tersebut. Ekowisata juga selalu disesuaikan dengan perjanjian-perjanjian lingkungan yang telah disepakati. Karenanya ekowisata dan lingkungan adalah merupakan sebuah proses yang selaras.

2. Ekowisata Indonesia

Indonesia sebagai negara megabiodiversity nomor dua di dunia, telah dikenal memiliki kekayaan alam, flora dan fauna yang sangat tinggi. dari keanekaragaman hayati yang ada di bumi ini, Indonesia memiliki 10% jenis tumbuhan berbunga, 12% binatang menyusui, 16% reptilia dan amphibia, 17% jenis burung, 25% jenis ikan dan 15% jenis serangga. Indonesia yang mempunyai kedudukan istimewa ini menjadi semakin unik karena dari sekitar 500-600 jenis mamalia besar yang

dimiliki, 36 persennya merupakan jenis endemik; dari 35 jenis primata yang ada, 25 persennya termasuk jenis endemik; dan dari 78 jenis burung paruh bengkok, 40 persennya merupakan jenis endemik; dan dari 121 jenis kupu-kupu, 44 persennya adalah jenis endemik. Dari kenyataan itu pula Indonesia di kenal sebagai salah satu negara mega bio-diversity atau mega-center keanekaragaman hayati di dunia.

Segala kekayaan alam yang dimiliki merupakan sebuah keunggulan yang potensial bagi pengembangan ekowisata Indonesia. Dengan keanekaragaman tersebut maka Indonesia berpeluang bagi pengembangan ekowisata.

Sebagaimana ekowisata pada umumnya, perkembangan ekowisata di Indonesia tidak dapat dipisahkan dan juga tidak terlepas dari berkembangnya isu lingkungan khususnya selama dua dekade terakhir. Terdapat tiga tahapan dalam perkembangan ekowisata di Indonesia.⁴⁶ Tahap pertama yakni periode imperialisme dunia. Periode pertama merupakan masa awal mula isu lingkungan muncul dan berkembang di eropa dan oleh pemerintahan Hindia Belanda kemudian diperkenalkan dan dijalankan meskipun pada ketika itu masih berupa taman-taman privat yang tertutup bagi rakyat. Hingga Indonesia merdeka, warisan yang masih terpelihara misalnya Taman nasional Gede Pangrango dan Kebun Raya Bogor, khususnya untuk konservasi flora dan media ilmu pengetahuan botani.

⁴⁶ Iwan Nugroho, *ECOTOURISM: Conservation Through Ecological Responsible Travel*, Fakultas pertanian, Universitas Widyagama Malang, Malang, 2006 (diakses 26 November 2009); diunduh dari <http://www.iwanug.worldpress.com>

Periode kedua adalah masa ditandainya perkembangan isu lingkungan global. Masa ini berkaitan erat dengan konferensi Stockholm 1972. Era dekade pertama paska konferensi dimana kegiatan konservasi meningkat seiring dengan perkembangan organisasi lingkungan internasional kegiatan ekowisata juga semakin berkembang. Masa ini termasuk didalamnya CITES yang kemudian diadaptasi dalam undang-undang pemeliharaan dan konservasi flora dan fauna. Dilanjutkan dengan era dekade kedua pasca Konferensi Stockholm yang ditandai dengan masa konferensi Rio yang kemudian menghasilkan Convention on Biological Diversity 1992 yang tercatat sebagai masa titik perkembangan ekowisata dalam konsep ekowisata sendiri. Pada tahap kedua ini mulai muncul kerangka berpikir kelembagaan beroperasinya ekowisata.

Periode terakhir yaitu masa ekowisata berkembang dengan pelibatan banyak entitas serta partisipasi stakeholder ekowisata. Periode ini merupakan kelanjutan dari periode-periode sebelumnya dimana ekowisata tumbuh dan berkembang di Indonesia. Dimasa ini juga mulai lahir komunitas ekowisata di Indonesia yang diilhami oleh TIES, hingga kemudian pada tahun 1996 lahir Masyarakat Ekowisata Indonesia atau MEI di Bali.

Dari ketiga tahapan diatas menunjukkan bahwa perkembangan ekowisata di Indonesia sebagaimana perkembangan ekowisata dunia memang selaras dengan bagaimana perkembangan isu lingkungan

Ekowisata dikembangkan dari pariwisata yang ternyata terbukti tidak mampu untuk maksimal dalam menjaga lingkungan. Pariwisata sebelumnya telah memberi peluang bagi terciptanya kegiatan yang kurang ramah lingkungan. Kegiatan pariwisata kurang melibatkan peran masyarakat sekitar, industri hanya dikuasai kaum pendatang dan para investor atau dengan kata lain hanya berhenti pada satu strata masyarakat tertentu. Di sisi lain pariwisata juga dilaksanakan tanpa memasukkan dan mengadaptasi prinsip *sustainable development*. Oleh karenanya ketika kemudian isu lingkungan semakin menglobal, maka hal tersebut juga diikuti dengan perkembangan pariwisata alam yang mengedepankan pelestarian alam, partisipasi masyarakat, dan entitas-entitas lainnya yang bertujuan pada pembangunan berkelanjutan.

Berdasarkan pertimbangan ekonomi, pemerintah Indonesia dan juga negara-negara lain yang memiliki potensi dibidang ekowisata, berusaha mempromosikan keunggulan komparatif yang mereka miliki yang disesuaikan dengan kebudayaan masing-masing negara sehingga kemudian muncul istilah sun (matahari), sand (pasir), sea (laut), sin (seks), yang terakhir di Indonesia dikoreksi menjadi smile (senyum) (widati, 2002).⁴⁷

Ekowisata adalah tentang menyatukan konservasi, masyarakat, dan perjalanan yang berkelanjutan. Hal tersebut berarti bahwa mereka

⁴⁷ Kresno Agus Hendarto, *Ekowisata dan peranan Perempuan, Buletin Penelitian dan Pengembangan*, Vol. 2, No. 2, Juli 2002, Diklat, Himpunan Perencana, p. 111

yang melaksanakan dan berpartisipasi dalam kegiatan ekowisata harus mengikuti prinsip-prinsip ekowisata.

Prinsip-prinsip ekowisata yang telah disepakati dalam forum-forum kerjasama internasional pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan dan kebudayaan dimasing-masing negara. Adapun prinsip-prinsip ekowisata di Indonesia adalah:

1. Memiliki kepedulian, tanggung jawab komitmen terhadap pelestarian lingkungan alam dan budaya, melaksanakan kaidah-kaidah usaha yang bertanggung jawab dan ekonomi berkelanjutan
2. Pengembangan harus mengikuti kaidah-kaidah ekologis dan dasar musyawarah dan pemufakatan masyarakat setempat.
3. Memberikan manfaat kepada masyarakat setempat.
4. Peka dan menghormati nilai-nilai sosial budaya dan tradisi keagamaan masyarakat setempat
5. Memperhatikan perjanjian, peraturan, perundang-undangan baik ditingkat nasional maupun internasional.

Ekowisata merupakan suatu konsep pariwisata yang mencerminkan wawasan lingkungan dan mengikuti kaidah-kaidah keseimbangan dan kelestarian lingkungan. Secara umum pengembangan ekowisata harus dapat meningkatkan kualitas hubungan antar manusia, meningkatkan kualitas hidup masyarakat

Pengembangan ekowisata sangat dipengaruhi oleh keberadaan unsur-unsur yang harus ada dalam pengembangan itu sendiri, yaitu:

1. Sumber daya alam, peninggalan sejarah dan budaya

Kekayaan keanekaragaman hayati merupakan daya tarik utama bagi pangsa pasar ekowisata sehingga kualitas, keberlanjutan dan pelestarian sumber daya alam, peninggalan sejarah dan budaya menjadi sangat penting untuk pengembangan ekowisata. Ekowisata juga memberikan peluang yang sangat besar untuk mempromosikan pelestarian keanekaragaman hayati Indonesia di tingkat internasional, nasional maupun lokal.

2. Masyarakat

Pada dasarnya pengetahuan tentang alam dan budaya serta daya tarik wisata kawasan dimiliki oleh masyarakat setempat. Masyarakat merupakan entitas yang terlibat langsung di lapangan, tempat dimana pelestarian alam dilaksanakan dan dikembangkan potensinya. Oleh karena itu pelibatan masyarakat menjadi mutlak, mulai dari tingkat perencanaan hingga pada tingkat pengelolaan.

3. Pendidikan

Ekowisata meningkatkan kesadaran dan apresiasi terhadap alam, nilai-nilai peninggalan sejarah dan budaya. Ekowisata memberikan nilai tambah kepada pengunjung dan masyarakat dalam bentuk pengetahuan dan pengalaman. Nilai tambah ini mempengaruhi perubahan perilaku dari pengunjung masyarakat

dan pengembang pariwisata agar sadar dan lebih menghargai alam, nilai-nilai peninggalan sejarah dan budaya.

4. Pasar

Kenyataan memperlihatkan kecenderungan meningkatnya permintaan terhadap produk ekowisata baik di tingkat internasional dan nasional. Hal ini disebabkan meningkatnya promosi yang mendorong orang untuk berperilaku positif terhadap alam dan berkeinginan untuk mengunjungi kawasan-kawasan yang masih alami agar dapat meningkatkan kesadaran, penghargaan dan kepeduliannya terhadap alam, nilai-nilai sejarah dan budaya setempat.

5. Ekonomi

Ekowisata memberikan peluang untuk mendapatkan keuntungan bagi penyelenggara, pemerintah dan masyarakat setempat, melalui kegiatan-kegiatan yang non ekstraktif, sehingga meningkatkan perekonomian daerah setempat. Penyelenggaraan yang memperhatikan kaidah-kaidah ekowisata mewujudkan ekonomi berkelanjutan.

6. Kelembagaan

Pengembangan ekowisata pada mulanya lebih banyak dimotori oleh Lembaga Swadaya Masyarakat, pengabdian masyarakat dan lingkungan. Hal ini lebih banyak didasarkan pada komitmen terhadap upaya pelestarian lingkungan, pengembangan

ekonomi dan pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan. Dalam perkembangannya, pemerintah memiliki peranan sentral dalam kegiatan pengembangan ekowisata tersebut mengingat kebijakan berkaitan dengan kegiatan pelestarian berada didalam kontrol pemerintah. Indonesia sendiri memiliki kepentingan yang sangat besar dari pembangunan sektor ekowisata tersebut. Oleh sebab itu pemerintah baik pusat maupun daerah kemudian sangat menaruh perhatian terhadap upaya-upaya pengembangan ekowisata bagi pemenuhan kepentingan nasionalnya.

Ekowisata Indonesia merupakan sebuah industri pariwisata yang menerapkan konsep lestari dan pengelolaan kolaboratif pemerintah, swasta, lembaga-lembaga nasional dan internasional serta khususnya masyarakat sekitar terhadap alam Indonesia. berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Indonesia memiliki kewajiban untuk segera melaksanakan tindakan pelestarian keanekaragaman hayati, dan menjaga eksistensi spesies-spesies flora dan fauna Indonesia bagi kepentingan Indonesia dan generasi mendatang. Ekowisata menuntut persyaratan tambahan bagi pelestarian alam. Oleh karenanya kemudian pemerintah mengambil langkah-langkah penyelamatan dengan bekerjasama dengan negara lain, IGO, INGO ataupun swasta membangun wilayah-wilayah bagi konservasi alam Indonesia seperti

Taman Nasional cuna pariwisata lestari di Indonesia

pengembangan area konservasi flora dan fauna Indonesia beserta habitatnya telah melahirkan dasar-dasar bagi pembangunan ekowisata Indonesia. beberapa area konservasi yang telah dibangun oleh pemerintah Indonesia seperti Suaka Margasatwa ataupun dalam bentuk Cagar Alam seperti Cagar Alam Ujung Kulon, Cagar Alam Way Kambas telah mampu menjadi cara melestarikan flora dan fauna sekaligus menjadi tujuan ekowisata dengan konsep yang terarah. Beberapa lainnya berbentuk Taman Nasional seperti Taman Nasional Lorentz, Taman Nasional Komodo, Taman Nasional Gunung Leuser, dan lain-lain ataupun Taman laut Bunaken, Taman laut Taka Bonerate telah terbukti menjadi tempat dimana flora dan fauna dapat berkembang biak dan menjaga kelangsungan hidupnya sekaligus menjadi tempat tujuan potensial yang mampu menarik wisatawan baik asing maupun mancanegara. Ada juga yang merupakan tempat konservasi yang dibangun jauh dari habitat asli hidupan liar seperti Kebun Binatang. Dewasa ini kebun binatang bahkan terbukti mampu untuk membiakkan dan menjaga keberlanjutan populasi satwa-satwa Indonesia seperti pada awal tahun 2010 di Kebun Binatang Surabaya telah berhasil ditetaskan sekitar 22 telur komodo dari beberapa indukan komodo yang berhasil bertahan hidup padahal spesies ini merupakan spesies yang sangat rentan penyakit dan sulit bertahan hidup jika dikembangkan jauh dari habitat aslinya di kepulauan Flores sebagaimana yang dialami kebun binatang di Australia yang hanya

berhasil merawat komodo selama dua tahun padahal komodo memiliki pertahanan hidup dan umur rata-rata yang relatif lama. Ataupun dalam pelaksanaan konservasi dan perlindungan hutan yang dapat dimanfaatkan sebagai Hutan Lindung, Hutan Wisata, dan lain-lainnya ataupun kebun Raya Bogor.

Pengembangan industri ekowisata Indonesia berkaitan erat dengan usaha konservasi alam. Membangun yang satu berarti secara tidak langsung juga melaksanakan pembangunan yang lain. Oleh karenanya ekowisata merupakan sebuah cara yang dapat dilaksanakan pemerintah untuk menciptakan industri yang lestari dengan bekerjasama dengan aparat-aparat negara dan departemen-departemen lain, khususnya dalam hal ini adalah Departemen Kehutanan yang merupakan pengelola dari keanekaragaman hayati Indonesia dalam salah satunya pelaksanaan peundangan CITES yang berusaha untuk melestarikan dan menjaga keberlangsungan hidup flora dan fauna yang merupakan komponen-komponen pembentuk industri ekowisata Indonesia. Ekowisata juga telah dapat dikategorikan sebagai sebuah pilihan bagi negara untuk lebih mudah dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan serta pemenuhan kewajiban negara untuk menyegerahkan melaksanakan konservasi dengan keterlibatan peran serta masyarakat dalam usaha mencegah bahaya kepunahan

keanekaragaman hayati dan kerusakan ekologis yang lebih parah

B. Ekowisata dan kepentingan Nasional Indonesia

1. Pembangunan bagi Kepentingan Nasional

Ide berkaitan dengan pembangunan berkembang setiap masanya. Pembangunan merupakan tujuan yang dicita-citakan oleh setiap negara, didalamnya terdapat kepentingan masing-masing negara yang mendesak untuk segera dipenuhi yang mendasari pengambilan kebijakan dan tingkah laku sebuah negara.

Dalam perkembangannya, secara luas terdapat dua interpretasi utama berkaitan dengan pembangunan tersebut. Pada sisi pertama pembangunan diartikan sebagai sebuah fenomena sosial yang menunjukkan peningkatan peradaban manusia. Terjadi secara alami seiring berjalannya waktu. Sejak awal masa palaeolitikum, pembangunan telah dibawa ke dalam ras manusia hingga pada era globalisasi sekarang ini. Sisi kedua dari pembangunan didefinisikan sebagai perubahan sosial terencana. Revolusi Boshelviks pada 1917 merupakan momentum pertama yang mengakhiri regim Tsar dan kemudian melahirkan regim baru yang berpusat pada perencanaan ekonomi. Proses dekolonisasi yang datang kemudian semakin menambah semangat pembangunan sebagai perubahan sosial terencana dan pembangunan kemudian menjadi fenomena abad 20.

Pembangunan di era globalisasi sekarang ini kemudian mengalami banyak perubahan. Sebagaimana perpolitikan yang berkembang di lingkup global, konsep pembangunan sendiri-pun

kemudian menyesuaikan dan mengadopsi isu-isu multilateralisme yang sedang berkembang seperti isu lingkungan. Di lain pihak, konsep pembangunan itu sendiri telah mengalami proses bagi pelaksanaannya, mengalami banyak perubahan hingga kemudian diperkenalkan pembangunan berkelanjutan yang banyak dikenal dan dilaksanakan oleh negara-negara sekarang ini.

Pembangunan berkelanjutan merupakan upaya pembangunan yang menggabungkan peningkatan ekonomi, kemasyarakatan dan keberlanjutan kehidupan lingkungan serta komponen-komponen lainnya yang penting bagi sebuah negara.

Dalam perkembangannya, pembangunan kemudian menjadi cita-cita bersama yang mendapat perhatian khusus dari organisasi-organisasi internasional seperti PBB. Berkaitan dengan masalah ekonomi, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan hidup, keberlanjutan hidup lingkungan dan lain-lainnya merupakan sebuah tujuan pembangunan bersama yang semuanya telah menjadi agenda pembahasan dalam PBB dan organisasi-organisasi internasional lainnya.

Perkembangan paradigma pembangunan juga telah memberi kontribusi bagi terciptanya dunia multilateralisme seperti sekarang ini. Dengan mempertimbangkan kekurangan-kekurangan akan paradigma pembangunan sebelumnya, maka dapat dilaksanakan evaluasi dan kemudian hal tersebut menjadi sebuah stimulus bagi berkembangnya

paradigma pembangunan baru yang banyak diadopsi oleh negara-negara dalam upaya pelaksanaan pembangunannya. Mulai dari paradigma pertumbuhan ekonomi yang hanya menjadikan ekonomi sebagai pusat dari pembangunan hingga paradigma pembangunan berbasis ekologis seperti sekarang ini yang kita kenal dengan pembangunan berkelanjutan.

Pada tahun 1990 telah dirumuskan sebuah tolak ukur bagi keberhasilan pembangunan disuatu negara yang disebut Human Development Index (HDI) / Indeks Pembangunan Manusia (IPM).⁴⁸

HDI merupakan tolak ukur pembangunan yang dirumuskan oleh pemenang nobel dari india, Amartya Sen dan Mahbub ul Haq seorang ekonom pakistan dan dibantu oleh Gustav Ranis dari Yale University dan Lord Meghnad Desai dari London School of Economics.

HDI adalah pengukuran perbandingan dari harapan hidup, melek huruf, pendidikan dan standar hidup untuk semua negara seluruh dunia. HDI kemudian digunakan oleh UNDP dalam upaya untuk mengukur keberhasilan pembangunan disuatu negara. UNDP menggunakan HDI dalam mengklasifikasikan apakah sebuah negara merupakan negara maju, negara berkembang atau negara terbelakang dan juga untuk mengukur pengaruh dari kebijaksanaan ekonomi terhadap kualitas hidup. HDI dijadikan tolak ukur dalam menganalisis pencapaian yang telah dilaksanakan oleh sebuah negara dalam

⁴⁸"*Index Pembangunan Manusia*", (diakses pada 23 April 2010); Diunduh dari http://id.wikipedia.org/wiki/Indeks_Pembangunan_Manusia

pembangunannya. Tolak ukur ini juga dimaksudkan untuk menstimulasi sebuah negara dalam meningkatkan pelaksanaan pembangunannya serta mengevaluasi kebijakan-kebijakan yang telah diambil untuk kemudian ditetapkan kebijakan-kebijakan baru memperbaiki kegagalan upaya sebelumnya.

HDI merupakan sebuah titik ukur bagi negara untuk mengambil dan melaksanakan kebijakan bagi pembangunan. Negara dituntut agar kebijakan-kebijakannya nanti mampu memenuhi kriteria-kriteria pembangunan, yakni perbandingan dari tingkat harapan hidup, melek huruf, pendidikan dan standar hidup untuk semua negara di seluruh dunia.

Dalam perkembangannya, HDI memberi kontribusi bagi pelaksanaan pembangunan disebuah negara. Dengan adanya tolak ukur tersebut maka sebuah negara kemudian memiliki dasar penilaian bagi pencapaiannya yang bisa menstimulasi negara untuk lebih baik lagi dalam menentukan kebijakan-kebijakannya dan menjalankannya dalam konsep pembangunan berkelanjutan sebagaimana pembangunan selama dasawarsa terakhir ini.

2. Ekowisata terhadap Upaya Pembangunan di Indonesia

Pembangunan sebagaimana diketahui merupakan sebuah transformasi institusional. Transformasi yang dimaksud adalah perubahan yang dilaksanakan oleh sebuah institusi menuju kehidupan

meningkatkan peradaban hidup manusia itu sendiri. Pembangunan negara adalah sebuah tujuan yang berisikan kepentingan-kepentingan nasional yang harus dipenuhi. Dengan mempertimbangkan tujuan-tujuan bersama nasional, masing-masing negara memiliki kebijakan-kebijakan bagi pemenuhan tujuan tersebut. Berbagai sektor pembangunan di Indonesia bergerak dengan motivasi yang sama untuk mencapai cita-cita masyarakat yang adil dan makmur. Tujuan pembangunan di Indonesia sebagaimana di negara-negara berkembang lainnya adalah salah satu utamanya untuk mengurangi kemiskinan.

Dalam dasawarsa terakhir, kemiskinan merupakan masalah besar yang harus dihadapi banyak negara negara berkembang seperti Indonesia. Kemiskinan membawa banyak dampak negatif yang berkelanjutan seperti minimnya pendidikan yang bisa didapat, kualitas hidup yang dibawah standar, hingga meningkatkan kegiatan kriminal. Kemiskinan bahkan mampu untuk memiskinkan demokrasi di Indonesia. Kurangnya pengetahuan masyarakat serta tingkat pendidikan yang rendah akan membawa dampak bagi merosotnya demokratisasi di Indonesia. Pengetahuan masyarakat yang terbatas akan berdampak pada kurangnya partisipasi seluruh lapisan masyarakat dalam kontrol pemerintahan sehingga hal tersebut bisa memberikan peluang bagi terlaksananya pemerintahan otoriter dan meningkatkan kegiatan korupsi, kolusi dan nepotisme seperti sebelumnya. Diluar daripada semua itu kemiskinan mendorong

masyarakat bersikap anarkis. Kurangnya pengetahuan akan menjadikan masyarakat mudah dibodohi dan dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu serta kurang bisa berpikir bijaksana sehingga satu-satunya tindakan yang mampu terpikirkan oleh masyarakat adalah tindak kekerasan. Ataupun kegiatan masyarakat yang kurang berpengetahuan dan berpikiran tertutup karena kurangnya pendidikan dan informasi akan bisa mengancam kehidupan keanekaragaman hayati di Indonesia. Masyarakat kurang merasa berkepentingan untuk menjaga dan merasa memiliki serta memikirkan bagaimana menjaga kekayaan nasional untuk generasi yang akan datang sehingga bersikap eksploitatif terhadap lingkungan sekitar yang menambah kerusakan yang selama ini ada. Semua hal tersebut akan semakin memiskinkan masyarakat, dan efeknya akan terus berulang jika tidak dilaksanakan perubahan dan pembangunan secepatnya.

Namun kemiskinan hanyalah salah satu aspek saja bagi mendesaknya pelaksanaan pembangunan. Pembangunan juga diperlukan bagi mengukur keberhasilan pemerintahan yang telah dijalankan selama ini.

Kebutuhan akan pembangunan sangatlah mendesak mengingat kepentingan manusia Indonesia yang beragam serta seluruh kawasan yang didalamnya hidup keanekaragaman hayati yang membutuhkan perlindungan dari tindakan-tindakan yang tidak bertanggung jawab.

Kegagalan bagi pertanggungjawaban pembangunan lebih

manusia dan pelestarian lingkungan pada akhirnya nanti memberi dampak negatif bukan hanya kemerosotan dan kehilangan yang dirasakan oleh Indonesia melainkan kerugian besar akan pandangan internasional bagi Indonesia yang semakin menurunkan status Indonesia selama ini dimata dunia.

Pemenuhan kepentingan nasional dalam dekade terakhir telah mengalami peningkatan yang signifikan. Pelaksanaannya tidak hanya berhenti pada diplomasi-diplomasi yang formal. Setiap kegiatan, setiap keunggulan yang dimiliki suatu negara berpeluang bagi terciptanya kegiatan diplomasi antar aktor baik negara maupun non-negara serta individu. Sudah lebih dari 20 tahun terakhir ini studi ilmu hubungan internasional mengintegrasikan berbagai macam isu dalam pelaksanaan diplomasi suatu negara. Pembangunan memungkinkan dilaksanakan dengan cara-cara yang berbeda antara negara yang satu dengan negara yang lain. Dan selama abad terakhir ekonomi dengan investasi menjadi isu yang dikedepankan Indonesia sehingga kegiatan industrialisasi berkembang di Indonesia sebagai tulang punggung pembangunan.

Dengan wilayah yang luas, potensi alamnya yang kaya akan mineral, bahan tambang, pertanian, perkebunan, dan luas wilayah lautnya yang menjadikannya kaya akan sumber daya kelautan membuat iklim investasi di Indonesia berkembang pesat. Indonesia

perdagangan dunia yang sangat menguntungkan bagi kegiatan ekonomi yang ada.

Namun begitu segala kekayaan alam yang dimiliki Indonesia tidak semuanya mudah diperbaharui bahkan beberapa lainnya akan sama sekali habis jika terus menerus dieksplorasi. Hal ini nantinya akan menghawatirkan bagi pembangunan di Indonesia sendiri sebagai wilayah industri. Sebagaimana sejauh ini diketahui bahwa arus kehidupan di Indonesia sebagian besar ditopang oleh lalu lintas perindustrian, kemudian harus mencari alternatif lainnya sebagai upaya melanjutkan arus kehidupan ekonomi dan pembangunan yang ada tersebut sebagai upaya peralihan. Bagaimanapun upaya peralihan tersebut juga harus mampu memanfaatkan potensi sumber daya alam, budaya, dan manusia yang dimiliki dan dianalisa potensi keberlanjutannya serta disesuaikan dengan perkembangan isu-isu yang ada sehingga nantinya bisa menjadi alat untuk keberlanjutan pembangunan di Indonesia. Dalam hal ini, Indonesia dapat menggunakan ekowisata sebagai sebuah sektor alternatif bagi pelaksanaan pembangunannya.

Peningkatan isu lingkungan dalam perpolitikan dunia telah membawa ekowisata mengalami perkembangan yang signifikan. Ekowisata telah dijadikan alat bagi sebuah negara untuk mencapai kepentingan bahkan memenuhi kewajiban baik institusional maupun moral bagi tanggung jawab akan pelestarian lingkungan. Ekowisata

merupakan kegiatan yang memiliki keterkaitan lintas sektor dan lintas skala usaha. Pelaksanaan kegiatan ekowisata akan mampu mempengaruhi kegiatan-kegiatan ekonomi lainnya.

Perkembangan sektor ekowisata ini nantinya seperti dijelaskan akan berdampak bagi pembangunan Indonesia khususnya masing-masing wilayahnya. Pariwisata kemudian mempengaruhi pembangunan secara multisektoral. Lindberg (1996) menyatakan bahwa dampak dari pariwisata, atau aktivitas ekonomi apapun, dapat digolongkan ke dalam 3 katagori, yaitu langsung (direct), tidak langsung (indirect) dan ikutan/ lanjutan (induced).⁴⁹ Ekowisata merupakan suatu sektor yang memiliki ketiga efek tersebut.

Secara langsung kegiatan ekowisata dapat menyumbangkan devisa bagi wilayah Objek Daerah Tujuan Wisata (ODTW) tertentu. Dewasa ini, sektor pariwisata dianggap sebagai sektor yang sangat potensial untuk menambah sumber devisa negara dari pendapatan nonmigas. Indonesia sebagaimana negara-negara berkembang lainnya berusaha untuk mengembangkan sektor ekowisata mengingat Indonesia juga memiliki keunggulan alam yang sangat potensial. Hal

⁴⁹ Kresno Agus Hendarto, Ekowisata: Sebuah Diferensiasi Produk Pariwisata di Indonesia Pasca Tragedi Bali, (diakses pada 26 Juli 2010), diunduh dari

ini dapat terlihat dari banyaknya program pengembangan pariwisata yang ada di negara tersebut (Spillane, 1993: 46).⁵⁰

Kegiatan ekowisata adalah salah satu kegiatan wisata yang pertumbuhannya cukup besar yaitu sekitar 20% dari total perjalanan internasional (Damanik dan Weber, 2006: 43). Oleh karena itu, Pemerintah Indonesia melaksanakan kegiatan ekowisata yang berlokasi di kawasan pelestarian alam dengan harapan memberikan dampak positif dalam menciptakan lapangan kerja, peningkatan kesejahteraan masyarakat, peningkatan devisa negara dan untuk melaksanakan upaya konservasi.

Ekowisata sangat berperan bagi peningkatan ekonomi Indonesia. sebagaimana disebutkan bahwa pariwisata merupakan penyumbang terbesar devisa Indonesia setelah migas dan dewasa ini ekowisata merupakan yang terbesar dari industri pariwisata Indonesia, pada tahun 2008 menurut Kepala Pusat Informasi Kehutanan, Masyhud, ekowisata telah menyumbangkan devisa negara sebesar 80 Triliun ke kas negara. Hal tersebut dipengaruhi oleh kedatangan wisatawan asing ke Indonesia dan pembelanjaan yang mereka lakukan. jumlah wisatawan asing yang datang melalui sebelas gerbang utama Indonesia mencapai 5,2 juta orang, atau naik sebesar 19,8% dari tahun 2007, yang memberikan keuntungan besar bagi Indonesia. pendapatan

⁵⁰ Mukhamad Leo, *Bentuk Partisipasi Masyarakat Terhadap Atraksi Wisata Pendakian Gunung Slamet*, Kawasan Wisata Guci, Jurusan Perencanaan Wilayah dan kota, Fakultas Teknik, Universitas Diponegoro Semarang, Semarang:2008, (diakses pada:27 Juli 2010); diunduh dari http://eprints.undip.ac.id/4654/1/Mukhamad_Leo.pdf

Indonesia naik sebesar 33% dari tahun 2007.⁵¹ Pariwisata Indonesia terus berkembang setiap tahunnya, namun begitu ekowisata sebagaimana pariwisata pada umumnya sangat dipengaruhi oleh isu-isu nasional dan internasional yang sedang berkembang. Ekowisata menuntut kepercayaan tinggi masyarakat dunia untuk bersedia melakukan perjalanan wisata ke negara-negara tujuan wisata. Hal ini sebagaimana yang terjadi paska bom Bali I dan II. Jumlah wisatawan yang datang ke Indonesia paska bom Bali I menurun akibat isu ketidakamanan nasional Indonesia sehingga aliran devisa turun sebesar US \$ 4,8 Milyar pada tahun 2004, hal yang kemudian berpengaruh terhadap pendapatan nasional. kemudian dilanjut tragedi Bom Bali II pada oktober 2005 juga telah mempengaruhi aliran devisa negara sehingga pada tahun 2006 terjadi penurunan aliran devisa Indonesia sebesar US \$ 4,45 Milyar. Namun begitu, usaha pemerintah dalam membangun ekowisata dan memperbaiki segala fasilitas termasuk didalamnya keamanan, kenyamanan dan keunggulan demi meningkatkan citra dimata masyarakat dunia telah memberi kontribusi yang besar bagi pembangunan ekowisata sendiri. Pada tahun 2007 terjadi peningkatan jumlah wisatawan yang datang ke Indonesia sebesar 2,19% dari tahun 2006 dan devisa pada 2008 naik sebesar 37,9% dan terus meningkat pada 2009. Kunjungan wisatawan

⁵¹ Kementerian Kehutanan Republik Indonesia, *Melambungkan Devisa Melalui Ekowisata*, (diakses pada 27 Juli 2010), diunduh dari <http://www.kemhutan.go.id>

mancanegara (wisman) ke Indonesia pada Januari hingga September 2009 secara kumulatif mencapai 4.619.483 orang atau tumbuh 1,07% jika dibandingkan periode yang sama tahun 2008 sebesar 4.570.492 orang.

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata bekerjasama dengan Bank Indonesia melakukan survey terhadap wisatawan yang masuk dan keluar Indonesia. Bagaimana perbandingan dan neraca antara penghasilan devisa dari kunjungan wisman dengan pengeluaran devisa akibat “kepergian” warga Indonesia ke luar negeri untuk berwisata yang kemudian oleh BI dihitung selisihnya sebagaimana dalam tabel dibawah (dalam juta US dollar)⁵².

Tabel 3.1

Hasil survey Dibudpar dan BI terhadap wisatawan yang masuk dan keluar Indonesia.

Tahun	Inflows	Outflow	Net
2004	4.798	3.507	1.291
2005	4.522	3.584	938
2006	4.448	4.030	414
2007	5.346	4.904	442
2008	7.374	5.397	1.977
2009	1.422	1.101	321
(Q.I)			

⁵² Arifin Hutabarat, Menyongsong tutup 2009 dan buka 2010, Travel Tourism Indonesia, (diakses pada 30 Juli 2010); diunduh dari

Data diatas diambil dari tahun 2004 hingga pertengahan tahun 2009 yang mana dapat kita lihat bahwa dari hasil survey mengindikasikan terjadi peningkatan aliran devisa dari sektor kedatangan wisatawan setiap tahunnya kecuali pada 2005 dan 2006 yang menurun diakibatkan isu-isu nasional Indonesia khususnya Bom Bali II.

Perkembangan ekowisata sebagaimana dijelaskan diatas juga memiliki efek tidak langsung. Efek secara tidak langsung seperti perkembangan ekowisata akan diikuti oleh berkembangnya sektor-sektor lain yang terkait seperti perhotelan, restoran, perdagangan dan kerajinan rakyat yang aktornya mayoritas adalah masyarakat sekitar daerah ekowisata. Dilain pihak, ekowisata yang dijalankan dengan konsep pelibatan masyarakat setempat akan memberi peluang bagi meningkatkan kreatifitas masyarakat. Masyarakat kemudian akan dituntut untuk secerdas mungkin memanfaatkan peluang yang ada. Membuat suatu usaha baru dengan pangsa pasar wisatawan. Memberi kesempatan bagi masyarakat untuk menjadi wiraswata yang mampu menyediakan lowongan kerja baru. Pada tahun 2001, pariwisata telah menciptakan kesempatan kerja bagi 207 juta orang atau lebih dari 8% kesempatan kerja di dunia dan tahun 2005 meningkat yaitu menciptakan lapangan kerja bagi 305 juta orang (Pitana dan Gaurati

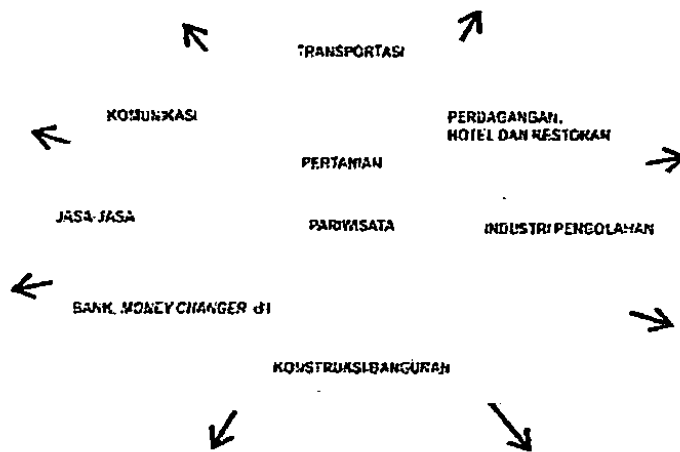
2005: 5)⁵³. Dengan kata lain, *multiplier effect* yang timbul dari kegiatan ekowisata sebagai bagian dari industri pariwisata tersebut memberikan kontribusi yang besar terhadap pembangunan di negara-negara penyedia jasa ekowisata.

Di bidang lain, perkembangan ekowisata juga akan berpengaruh pada peningkatan kualitas hidup manusia. Ekowisata akan mendorong pemerintah dengan kerjasama swasta yang melihat prospek dari kegiatan ekowisata tersebut untuk meningkatkan infrastruktur di daerah wisata. Hasilnya, akses lalu lintas jalan menjadi mudah. Kemudahan akses ini akan juga memudahkan masuknya arus barang, informasi dan teknologi ke sebagian besar pelosok Indonesia hingga wilayah yang awalnya sulit dijangkau. Perkembangan arus informasi akan sedikit demi sedikit membantu pemahaman masyarakat sehingga masyarakat diharapkan bisa terbuka pada hal-hal baru. Pemikiran terbuka masyarakat kemudian akan sedikit banyak berpengaruh pada kesadaran masyarakat terhadap pendidikan. Pendidikan akan bisa membantu masyarakat untuk pandai memilah informasi yang masuk dan berusaha menjadi masyarakat cerdas yang berkesadaran. Arus informasi dan teknologi yang ada akan membantu memperbaiki mutu pendidikan yang ada disesuaikan dengan perkembangan yang terjadi.

⁵³ Mukhamad Leo, *Bentuk Partisipasi Masyarakat Terhadap Atraksi Wisata Pendakian Gunung Slamet, Kawasan Wisata Guci*, Jurusan Perencanaan Wilayah dan kota, Fakultas Teknik, Universitas Diponegoro Semarang, Semarang:2008, (diakses pada:27 Juli 2010); diunduh dari http://eprints.undip.ac.id/4654/1/Mukhamad_Leo.pdf

Lebih jauh lagi jika dikorelasikan, tingkat pendidikan yang berkualitas diharapkan nantinya akan mampu mencetak para pemimpin negara yang berkualitas juga. Disamping lain, masyarakat berkesadaran akan mengerti bagaimana kemudian menjaga dan meningkatkan kualitas hidup dan lingkungan sehingga akan membantu terwujudnya pembangunan berbasis manusia dan lingkungan yang dicita-citakan.

Peran ekowisata sangat besar bagi pembangunan di Indonesia. Lebih sederhana sebagaimana dijelaskan dalam diagram dibawah ini:



Dari diagram diatas, dapat dilihat bagaimana kemudian ekowisata sebagai produk dari pariwisata yang telah disesuaikan dengan konsep keberlanjutan dapat mempengaruhi sektor-sektor lainnya yang kesemua hal tersebut pada akhirnya disamping membantu Indonesia dalam mencapai kepentingan nasionalnya, juga akan meningkatkan standar Indonesia dimata dunia berdasarkan pada salah satunya standar Human Development Index (HDI) oleh UNDP dimana

keberhasilan pembangunan negara akan diukur berdasarkan pengukuran perbandingan dari tingkat harapan hidup, melek huruf, pendidikan dan standar hidup untuk semua negara.

Jika ditilik kembali, ekowisata bisa memberikan kontribusi cukup besar bagi sebuah instrumen alternatif pelaksanaan pembangunan di Indonesia. Bahkan pada tahun 1994, John Naisbitt seorang futuristik dalam bukunya *Global Paradox* menyatakan bahwa wilayah hutan dan perairan dengan seluruh kekayaannya merupakan modal dasar pengembangan pariwisata alam yang nantinya akan menjadi satu industri besar di millenium ketiga disamping telekomunikasi dan transportasi.

Ekowisata telah terbukti bisa menjadi sebuah industri bagi pemenuhan kepentingan nasional negara, bagi upaya pelaksanaan pembangunan berkelanjutan yang di cita-citakan